PENGARUH EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTAKEDIRI 2018-2025

Tri Wahyu Pradana[1], Akhmad Naruli[2], Beby Hilda Agustin[3]
triwhyprdn1833@gmail.com[1], naruliakhmad@gmail.com[2], bebyhilda@uniska-kediri.ac.id[3]
Universitas Islam Kadiri

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh efektivitas pajak parkir dan laju pertumbuhan pajak parkir secara parsial maupun simultan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kediri periode 2018–2025. Landasan teori yang digunakan mencakup Stewardship Theory dan Teori Efektivitas Organisasi. Fenomena penting dalam periode pengamatan ini dipengaruhi oleh transisi regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, implementasi digitalisasi pemungutan pajak (QRIS dan Virtual Account), serta potensi peningkatan volume kendaraan seiring beroperasinya Bandara Internasional Dhoho Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder berjenis deret waktu triwulanan (quarterly time series) selama periode 2018–2025 yang diperoleh dari BPKAD Kota Kediri. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh (total sampling) dengan jumlah observasi sebanyak 31 data triwulanan (setelah memperhitungkan pengurangan 1 periode awal akibat penggunaan rumus rasio pertumbuhan t dibanding $t-1$). Teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi ($R2$) menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Efektivitas Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Kediri ($t$hitung = signifikan; $p < 0{,}001$). Laju Pertumbuhan Pajak Parkir secara parsial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Kediri ($t$hitung = signifikan; koefisien = 0,584; $p < 0{,}001$). Secara simultan, Efektivitas Pajak Parkir dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Kediri (Fhitung = 13,258; $p < 0{,}001$). Nilai Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,450 menunjukkan bahwa 45,0% variasi peningkatan PAD Kota Kediri dapat dijelaskan oleh efektivitas dan laju pertumbuhan pajak parkir, sedangkan sisa 55,0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan sistem digitalisasi serta pengelolaan potensi penerimaan secara berkelanjuta guna mendorong laju pertumbuhan dan optimalisasi realisasi penerimaan pajak daerah.
Kata Kunci: Efektivitas Pajak Parkir, Laju Pertumbuhan Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, BPKAD Kota Kediri.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of parking tax effectiveness and parking tax growth rate, both partially and simultaneously, on the increase of Local Genuine Income (PAD) at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kediri City for the period 2018–2025. The theoretical framework utilized includes Stewardship Theory and Organizational Effectiveness Theory. Key phenomena during this observation period are influenced by regulatory transitions following the enactment of Law Number 1 of 2022 on Intergovernmental Financial Relations (UU HKPD), the implementation of tax collection digitalization (QRIS and Virtual Accounts), and the potential increase in vehicle volume following the operation of Dhoho International Airport in Kediri. The research method employed is quantitative with a causal associative approach. The data used are secondary quarterly time-series data for the 2018–2025 period obtained from BPKAD Kediri City. Sampling was conducted using a total sampling technique resulting in 31 quarterly observations (after accounting for the reduction of one initial period due to the application of the growth ratio formula comparing period

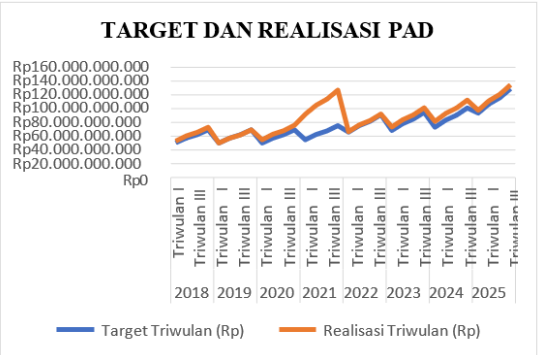
t to t − 1). Data analysis techniques include descriptive statistics, classic assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing via t-test (partial), F-test (simultaneous), and coefficient of determination (R2) using SPSS. The results indicate that partially, Parking Tax Effectiveness has a positive and significant effect on the increase of Kediri City's PAD (tstatistic = significant; p < 0.001). Partially, Parking Tax Growth Rate also has a positive and significant effect on the increase of Kediri City's PAD (tstatistic = significant; coefficient = 0.584; p < 0.001). Simultaneously, Parking Tax Effectiveness and Parking Tax Growth Rate significantly affect the increase of Kediri City's PAD (Fstatistic = 13.258; p < 0.001). The Adjusted R Square value of 0.450 demonstrates that 45.0% of the variation in Kediri City's PAD increase can be explained by parking tax effectiveness and growth rate, while the remaining 55.0% is influenced by other variables outside the research model. The implications of this study emphasize the importance of strengthening supervision of digital systems and maintaining continuous revenue management to promote stable growth rates and optimize local tax revenue realization.
Keywords: *Parking Tax Effectiveness, Parking Tax Growth Rate, Local Genuine Income, BPKAD Kediri City.*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal dan keberhasilan otonomi daerah. PAD berasal dari potensi ekonomi lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah dan terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan secara efektif dan berkelanjutan guna mendukung pembiayaan pembangunan. Pengelolaan keuangan yang efisien serta penguatan administrasi dan tata kelola pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan dan kinerja keuangan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang berperan strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Namun, penerimaan pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait efektivitas pemungutan dan ketidakstabilan pertumbuhan penerimaan. Efektivitas pemungutan pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan, sedangkan laju pertumbuhan pajak menggambarkan perubahan realisasi penerimaan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemantauan terhadap efektivitas pemungutan dan pertumbuhan penerimaan pajak diperlukan untuk menilai konsistensi kinerja penerimaan daerah serta mendukung optimalisasi pajak daerah secara berkelanjutan.

Gambar 1 Target dan Realisasi PAD Kota Kediri



Sumber: BPKAD Kota Kediri

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri selama periode 2018–2025 menunjukkan tren fluktuatif yang mencerminkan dinamika pengelolaan penerimaan

daerah. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kediri, realisasi PAD meningkat dari Rp253,02 miliar pada 2018 menjadi Rp389,83 miliar pada 2024 dan diproyeksikan melampaui Rp466 miliar pada akhir 2025. Salah satu sektor yang perlu diperhatikan adalah pajak parkir, yang memiliki potensi penerimaan cukup besar, tetapi masih menghadapi kendala dalam menjaga stabilitas pertumbuhan dan mengoptimalkan realisasi penerimaan. Pada 2018, realisasi pajak parkir mencapai Rp1,63 miliar dari target Rp1,30 miliar dengan efektivitas 125,7%. Namun, penerimaan menurun menjadi Rp958,35 juta pada 2020 akibat pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19, kemudian meningkat menjadi Rp1,94 miliar pada 2023 sebelum kembali menurun menjadi Rp1,60 miliar pada 2024 dan Rp1,23 miliar pada 2025. Meskipun kontribusinya terhadap PAD relatif kecil, yaitu sekitar 0,5%–1,2%, fluktuasi penerimaan pajak parkir menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pemungutan dan laju pertumbuhannya.

Permasalahan pajak parkir juga ditemukan di berbagai daerah, seperti Kota Pekanbaru dan Kota Tasikmalaya, yang menghadapi kendala berupa fluktuasi penerimaan, keterbatasan pengawasan, perlambatan pertumbuhan, dan keterbatasan fasilitas pemungutan. Di Kota Kediri, evaluasi semakin penting seiring perubahan tata kelola keuangan daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta penyesuaian regulasi melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, beroperasinya Bandara Internasional Dhoho Kediri serta berkembangnya kawasan bisnis dan pusat perbelanjaan membuka potensi peningkatan penerimaan pajak parkir. BPKAD Kota Kediri juga telah menerapkan digitalisasi pembayaran pajak daerah melalui integrasi Virtual Account dan QRIS untuk mendukung optimalisasi penerimaan.

Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik sebagai usaha utama maupun fasilitas penunjang usaha. Efektivitas pemungutan pajak parkir menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan sesuai target yang ditetapkan, yang diukur melalui perbandingan antara realisasi dan target penerimaan. Sementara itu, laju pertumbuhan penerimaan menggambarkan perubahan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir di Kota Surabaya tergolong cukup efektif dengan rata-rata 89,6%, tetapi potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian di Kota Malang juga menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir mengalami fluktuasi akibat dinamika aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, analisis efektivitas dan laju pertumbuhan pajak parkir di Kota Kediri periode 2018–2025 diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pemungutan serta mengetahui sejauh mana pengelolaan, digitalisasi, dan penyesuaian regulasi mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Gambar 2 Target dan Realisasi Pajak Parkir



Sumber: BPKAD Kota Kediri

Laju pertumbuhan pajak parkir merupakan faktor penentu utama keberlanjutan penerimaan. Laju pertumbuhan mencerminkan besarnya kenaikan atau penurunan penerimaan pajak parkir yang dicapai pada suatu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Mahmudi, 2019). Laju pertumbuhan yang positif dan tinggi menunjukkan perkembangan penerimaan pajak yang sehat serta potensi pasar yang terus berkembang. Sebaliknya, laju pertumbuhan yang negatif atau melambat dapat menurunkan akselerasi peningkatan PAD (Saepulloh & Yanti, 2023). Faktor penyebab fluktuasi laju pertumbuhan meliputi perubahan kondisi ekonomi makro, kebijakan tarif, serta penyesuaian system administrasi berbasis teknologi (Saepulloh & Yanti, 2023). Di sisi lain, temuan Nurjannah, Muliadi, & Effendi (2016) menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir memiliki efektivitas tinggi namun kontribusinya relatif kecil terhadap PAD secara keseluruhan. Studi Sibarani, Susilawaty, & Junawan (2024) menemukan kontribusi pajak parkir di Kota Medan hanya berkisar 0,51% hingga 1,09%. Meskipun kontribusi nominal pajak parkir saat ini relatif kecil terhadap total PAD Kota Kediri, sektor ini memiliki multiplier effect dan kerentanan fluktuasi yang tinggi di lapangan. Rendahnya proporsi kontribusi saat ini justru menjadi pembenaran kuat (justification) bahwa efektivitas pemungutan dan laju pertumbuhan pajak parkir di Kota Kediri perlu diuji secara komprehensif. Hasil penelitian Kesek (2013) di Manado serta Wulandari, Nurmala, & Hendri (2022) juga menunjukkan adanya inkonsistensi temuan (research gap) mengenai signifikansi pengaruh pajak parkir terhadap PAD di berbagai daerah.

Berdasarkan literatur terdahulu, sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti analisis deskriptif mengenai efektivitas atau kontribusi semata. Penelitian yang menguji pengaruh efektivitas pemungutan pajak parkir dan laju pertumbuhan pajak parkir secara simultan maupun parsial terhadap peningkatan PAD, khususnya pada periode transisi regulasi 2018–2025 di Kota Kediri, masih relatif terbatas. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Efektivitas Pajak Parkir dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2018–2025.”

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas pajak parkir dan laju pertumbuhan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri periode 2018–2025. Variabel independen terdiri atas efektivitas pajak parkir (X1) dan laju pertumbuhan pajak parkir (X2), sedangkan variabel dependen adalah PAD (Y). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel melalui analisis statistik, khususnya regresi linear berganda. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025–2026 dengan lokasi penelitian di Kota Kediri, sedangkan data diperoleh dari instansi pengelola pajak daerah, yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kediri.

Populasi penelitian mencakup seluruh data penerimaan pajak parkir dan PAD Kota Kediri selama periode 2018–2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh (total sampling), yaitu seluruh data yang tersedia digunakan sebagai sampel. Data yang digunakan berbentuk data kuantitatif sekunder berupa laporan target dan realisasi pajak parkir, laporan realisasi PAD, serta data pendukung terkait penerimaan pajak daerah. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap laporan resmi instansi dan studi pustaka dengan memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu sebagai landasan teori dan pendukung analisis.

Pengamatan dilakukan menggunakan data triwulanan selama delapan tahun, sehingga diperoleh 32 periode pengamatan. Namun, jumlah sampel efektif yang dianalisis adalah 31 observasi karena perhitungan laju pertumbuhan memerlukan data periode sebelumnya sebagai pembanding. Variabel efektivitas pajak parkir diukur melalui perbandingan realisasi penerimaan dengan target penerimaan, kemudian dikalikan 100%. Penilaian efektivitas menggunakan kategori sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. Sementara itu, laju pertumbuhan pajak parkir (X2) diukur berdasarkan perubahan realisasi penerimaan pajak parkir triwulanan dibandingkan periode sebelumnya. Variabel PAD (Y) diukur menggunakan rasio pertumbuhan PAD triwulanan untuk mengetahui perubahan penerimaan dari satu periode ke periode berikutnya.

Analisis data diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi setiap variabel. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas berdasarkan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, serta uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Setelah persyaratan analisis diperiksa, data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh efektivitas pajak parkir dan laju pertumbuhan pajak parkir terhadap PAD. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial, uji F untuk menguji pengaruh kedua variabel secara simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Jadwal penelitian disusun untuk periode November 2025 hingga Mei 2026, meliputi pengajuan judul, penyusunan proposal, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Tahapan tersebut dirancang agar pelaksanaan penelitian berlangsung secara sistematis dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Gambaran Umum

a) Sejarah Instansi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kediri, yang memiliki sejarah perjalanannya dalam tata kelola keuangan daerah. Pada mulanya, urusan pendapatan, pengolahan keuangan, dan aset berada di bawah wadah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Kediri, sebelum sempat mengalami pemekaran menjadi dua lembaga terpisah pada tahun 2014, yaitu Dinas Pendapatan (Dispenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA). Seiring dinamika regulasi nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta penyesuaian susunan organisasi perangkat daerah di Kota Kediri, fungsi penunjang urusan keuangan dan pengelolaan aset daerah ini dilembagakan menjadi badan penunjang pemerintah kota. Dalam perkembangannya, instansi ini mengalami penyederhanaan birokrasi dan reorientasi struktur organisasi sebagaimana terlihat pada bagan penetapan oleh Walikota Kediri di mana seksi-seksi di bawah bidang teknis ditransformasikan menjadi Sub-Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional guna mengoptimalkan efisiensi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah Kota Kediri.

b) Visi Misi BPPKAD Kota Kediri

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, BPKAD Kota Kediri menetapkan arah strategis instansi yang ditujukan untuk:

a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

c) Struktur Organisasi

Gambar 3 Struktur Organisasi



Sumber: Data Sekunder BPKAD Kota Kediri diolah (2026)

Bagan struktur organisasi ini menampilkan hirarki tata kelola pemerintahan Kota Kediri yang dipimpin oleh Kepala Badan sebagai pimpinan tertinggi, yang didampingi oleh Sekretariat sebagai unsur staf dan pelayanan administrasi (terbagi atas Sub Bagian Umum serta Sub-Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional) serta UPT Badan sebagai pelaksana teknis pelaksana tugas di lapangan. Untuk menjalankan fungsi operasional utamanya, Kepala Badan membawahi enam bidang teknis spesifik yang meliputi Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Pengendalian Operasional, Bidang Pembukuan dan Penagihan, Bidang Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji, serta Bidang Pengelolaan Aset, di mana setiap bidang tersebut ditopang oleh kelompok Sub-Koordinator dan Jabatan Fungsional untuk melancarkan pelaksanaan seluruh urusan pembangunan dan tata kelola keuangan daerah. Bagan pelaksanaan tugas ini ditetapkan secara resmi oleh Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar, dan disahkan salinannya sesuai asli atas nama Sekretaris Daerah Kota Kediri oleh Kepala Bagian Hukum, Muhlishina Lahuddin, SH.MH.

d) Tugas dan Fungsi Pokok

Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya

Pembahasan

1. Klasifikasi Data Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi berupa data PAD, data pajak parkir, dan data target pajak parkir di Kota Kediri yang sudah memberikan report data mereka untuk periode 2018 hingga 2025 dan telah melalui prosedur audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Studi ini memakai data yang bersifat sekunder, didapatkan melalui kantor BPKAD Kota Kediri. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pengujian hipotesis melalui data yang berbentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik.

Setelah melalui proses penyaringan tersebut, sebanyak 31 data triwulan PAD, pajak parkir, dan rasio laju pertumbuhan pajak dari tahun 2018-2025 sebagai sampel, maka total keseluruhan data yang dianalisis pada penelitian ini adalah 31 sampel.

Tabel 1 Klasifikasi Sampel

Klasifikasi Sampel	Jumlah Sampel	Keterangan
Data Realisasi PAD Triwulanan (2018–2025)	32 Triwulan	8x4 Triwulan
Data Target & Realisasi Pajak Parkir (2018–2025)	32 Triwulan	8x4 Triwulan
Pengurangan baseline perhitungan pertumbuhan	1 Triwulan	Triwulan I 2018 sebagai *baseline*
Total Sampel Efektif (*N*)	31 Triwulan	Siap diolah dalam regresi SPSS

Sumber: Data Sekunder BPKAD Kota Kediri diolah (2026)

Analisis Hasil Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memahami data melalui penafsiran nilai-nilai statistik, seperti nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, serta nilai standar deviasi di setiap variabel. Adapun hasil dari analisis statistik tersebut telah peneliti sajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Uji Statistik Deskrptif

Descriptive Statistics					
	N	***Minimum***	***Maximum***	***Mean***	***Std. Deviation***
Efektivitas Pajak Parkir (X1)	31	0,84	1,76	1,1747	0,27191
Laju Pertumbuhan Pajak Parkir (X2)	31	-0,59	0,14	0,0263	0,19314
Peningkatan PAD (Y)	31	-0,47	0,21	0,0457	0,16013

Sumber: Data Diolah SPSS 29

Berdasarkan tabel 2 Berdasarkan tabel statistik deskriptif, jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 31 observasi (N = 31). Variabel X1 memiliki nilai minimum sebesar 0,84 dan nilai maksimum sebesar 1,76, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 1,1747 serta standar deviasi sebesar 0,27191. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai variabel X1 berada pada angka 1,1747 dengan tingkat penyebaran data sebesar 0,27191. Karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata, maka dapat dikatakan bahwa data variabel X1 relatif homogen dan penyebaran datanya tidak terlalu besar. Variabel X2 memiliki nilai minimum sebesar -0,59 dan nilai maksimum sebesar 0,14, dengan nilai rata-rata sebesar 0,0263 serta standar deviasi sebesar 0,19314. Memiliki nilai minimum sebesar -0,59, nilai maksimum 0,14, mean 0,0263, dan standar deviasi 0,19314. Penyebab adanya nilai negatif (-0,59): Nilai minimum negatif ini terjadi karena X2 diukur menggunakan rumus rasio pertumbuhan realisasi (t) dibanding $t - 1$). Angka -0,59 mencerminkan adanya penurunan realisasi penerimaan pajak parkir yang sangat tajam pada Triwulan I tahun 2020 akibat berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pandemi. Rata-rata positif (0,0263) menunjukkan laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir secara umum tetap mengalami tren positif selama 8 tahun pengamatan.

Nilai rata-rata yang mendekati nol menunjukkan bahwa secara umum nilai X2 cenderung berada di sekitar angka nol. Standar deviasi yang lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya mengindikasikan bahwa variasi data pada variabel X2 cukup tinggi, sehingga penyebaran datanya relatif lebih beragam. Variabel Y memiliki nilai minimum sebesar -0,47 dan nilai maksimum sebesar 0,21, dengan nilai rata-rata sebesar 0,0457 serta standar deviasi sebesar 0,16013. Nilai rata-rata yang juga mendekati nol menunjukkan bahwa rata-rata nilai variabel Y relatif kecil. Standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-

ratanya menunjukkan bahwa data variabel Y memiliki penyebaran yang cukup luas atau heterogen, sehingga terdapat variasi nilai yang cukup besar antar observasi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilaksanakan untuk memastikan bahwa model regresi mempunyai distribusi yang normal. Diantara metode yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi serta memastikan apakah residual terdistribusi secara normal, melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) melebihi 0.05, maka hal tersebut menujukan bahwa residual tersalurkan secara normal serta sudah memenuhi salah satu uji asumsi klasik.

Tabel 3 Uji Normalitas

	Unstandardized Residual	Keterangan
N	31	Normal
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]	.173[d]	

Sumber: Data Diolah SPSS 29

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap residual, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,173. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (0,173 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Hasil Uji Multikoleniaritas

Pengujian multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui adanya hubungan linier antar variabel bebas dalam sebuah model regresi. Seandainya tidak ada hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas, maka model tersebut dapat dianggap sebagai model yang baik. Uji multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai tolerance serta nilai variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance melebihi 0.10 serta nilai VIF kurang dari 10, dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari permasalahan multikolinearitas.

Tabel 4 Uji Multikoleniaritas

Model		*Collinearity Statistics*	
		Tolerance	*VIF*
1	Efektivitas Pajak Parkir (X1)	0,972	1,028

Sumber: Data Diolah SPSS 29

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel Efektivitas Pajak Parkir (X1) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,972 dan VIF sebesar 1,028, sedangkan variabel Laju Pertumbuhan Pajak Parkir (X2) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,972 dan VIF sebesar 1,028. Kedua variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilaksanakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan varian residual antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Adapun dasar penarikan keputusan uji Park yakni, jika nilai (Sig.) melebihi 0.05 dapat dikatakan tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Efektivitas Pajak Parkir (X1)	0,482	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
Laju Pertumbuhan Pajak Parkir (X2)	0,531	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah SPSS 29

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, diperoleh nilai signifikansi variabel Efektivitas Pajak Parkir (X1) sebesar 0,482 dan variabel Laju Pertumbuhan Pajak Parkir (X2) sebesar 0,531. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual (ABS_RES). Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada model regresi berguna untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual pada periode sekarang

(t) dengan residual periode sebelumnya (t-1). Model regresi dinyatakan baik jika tidak terjadi korelasi antar residual. Jika korelasi tersebut ada, maka model mengalami masalah autokorelasi. Pengujian ini memakai uji Durbin-Watson (DW).

Tabel 6 Uji Autokorelasi

N	DU	Durbin Watson	DU < DW < 4-DU
31	1,60	2,133	1,60< 2,133 <2,40

Sumber: Data Diolah SPSS 29

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson Test, jumlah data (N) dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 observasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode tertentu dengan periode sebelumnya dalam model regresi. Nilai Durbin-Watson (DW) yang diperoleh sebesar 2,133, dengan nilai batas bawah (DU) sebesar 1,60. Selanjutnya, nilai batas atas dihitung dengan rumus 4 − DU, sehingga diperoleh nilai sebesar 2,40. Rentang pengujian menjadi 1,60 < DW < 2,40. Berdasarkan hasil tersebut, nilai DW sebesar 2,133 berada di antara nilai DU dan (4 − DU), yaitu 1,60 < 2,19 < 2,40. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW berada pada daerah yang tidak terdapat autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif. Tidak adanya autokorelasi menunjukkan bahwa residual pada model regresi bersifat independen dan tidak saling mempengaruhi antar periode. Hal ini penting karena pelanggaran asumsi autokorelasi dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik autokorelasi. Oleh karena itu, model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan penelitian.

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilaksanakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan linier antar dua variabel atau lebih, serta untuk mengetahui arah yang terbentuk variabel independen terhadap variabel dependen. Di bawah ini merupakan hasil perhitungan regresi linier berganda variabel Efektivitas Pajak Parkir, laju pertumbuhan Pajak Parkir yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Uji Regresi

Coefficients[a]						
Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	*t*	*Sig.*
		B	*Std. Error*	*Beta*		
1	*(Constant)*	2,327	,098		4,038	,976
	X1	,021	,009	,055	2,352	,021
	X2	,584	,114	,704	5,124	<,001

Sumber: Data Diolah SPSS 29

Merujuk pada hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan, sehingga dapat dituliskan persamaan regresi pada model penelitian ini yaitu:

Y=2,327+0,021X1+0,584X2

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 2,327 mengindikasikan apabila variabel Efektivitas Pajak Parkir (X_1) dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir (X_2) bernilai nol atau dianggap konstan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) diperkirakan sebesar 2,327. Koefisien regresi variabel Efektivitas Pajak Parkir (X_1) sebesar 0,021 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan efektivitas pajak parkir akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,021 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya, koefisien regresi variabel Laju Pertumbuhan Pajak Parkir (X_2) sebesar 0,584 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan laju pertumbuhan pajak parkir akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,584 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Kedua koefisien regresi bernilai positif, sehingga menunjukkan bahwa Efektivitas Pajak Parkir dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir memiliki hubungan searah dengan Pendapatan Asli Daerah, yaitu semakin tinggi efektivitas pemungutan dan Laju Pertumbuhan pajak parkir, maka Pendapatan Asli Daerah cenderung semakin meningkat.

2. Hasil Uji t

Uji t bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh signifikan dari variabel terikat.

Tabel 8 Uji t

Variabel	B	t	Sig	Keterangan
Efektivitas Pajak Parkir (X1)	,021	2,352	,021	Hipotesis Terdukung
Laju Pertumbuhan Pajak Parkir (X2)	,584	5,124	<,001	Hipotesis Terdukung

Sumber: Data Diolah SPSS 29

Berdasarkan hasil uji t, variabel Efektivitas Pajak Parkir (X_1) memperoleh nilai t hitung sebesar 2,352 dengan nilai signifikansi sebesar 0,021. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,021 < 0,05), sehingga H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pelaksanaan pemungutan pajak parkir, maka Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami peningkatan. Variabel Laju Pertumbuhan Pajak Parkir (X_2) memperoleh nilai t hitung sebesar 5,124 dengan nilai signifikansi < 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak parkir dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan semakin meningkat.

3. Hasil Uji f

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (X) secara bersama-sama atau serentak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y) dalam model regresi linear berganda.

Tabel 9 Uji f

	F Hitung	Sig
Regression	13,258	<,001[b]

Sumber: Data Diolah SPSS 29

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 13,258 dengan nilai signifikansi < 0,001. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (< 0,001 < 0,05), maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Parkir dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan atau variabel dari variabel terikat bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel bebas. Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi dapat menjelaskan kinerja dari model dalam memprediksi variabel tersebut. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi

Tabel 10 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	,697[a]	,486	,450	,11879

Sumber: Data Diolah SPSS 29

Berdasarkan hasil analisis pada tabel Model Summary, diperoleh nilai R sebesar 0,697, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel Efektivitas Pajak Parkir dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir dengan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, nilai R Square (R^2) sebesar 0,486 menunjukkan bahwa 48,6% variasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Efektivitas Pajak Parkir dan laju pertumbuhan Pajak Parkir secara bersama-sama. Sementara itu, 51,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti.

Pembahasan dan Interpretasi

1. Pengaruh Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2018-2025

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Efektivitas Pajak Parkir memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,021 (< 0,05) dengan koefisien regresi sebesar 0,021. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak parkir sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Efektivitas Organisasi, yang menyatakan bahwa suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pemungutan pajak parkir tercermin dari kemampuan pemerintah daerah mencapai target penerimaan pajak parkir. Semakin tinggi tingkat efektivitas tersebut, semakin besar pula penerimaan yang dapat dihimpun sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rahmawati et al. (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan objek penelitian, karakteristik daerah, periode penelitian, serta variabel yang digunakan. Penelitian Rahmawati et al. menggunakan variabel kontribusi pajak parkir sebagai variabel independen tambahan, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel laju pertumbuhan pajak parkir. Selain itu, kondisi pengelolaan pajak parkir di Kota Kediri memungkinkan efektivitas pemungutan memberikan pengaruh yang lebih nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini juga didukung oleh temuan Sibarani et al. (2025) yang menekankan pentingnya peningkatan efektivitas penerimaan pajak parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Meskipun penelitian tersebut menunjukkan kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih relatif rendah, hasilnya tetap mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas pemungutan merupakan langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

2. Pengaruh Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2018–2025

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Laju Pertumbuhan Pajak Parkir memperoleh nilai signifikansi < 0,001 dengan koefisien regresi sebesar 0,584. Hasil tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri. Dengan demikian, hipotesis kedua ($H2$) diterima. Artinya, semakin tinggi dan positif laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir yang dicapai dari periode ke periode, maka semakin besar akselerasi akumulasi penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Stewardship Theory, yang menjelaskan bahwa aparatur pemerintah daerah BPKAD Kota Kediri sebagai steward memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, steward yang responsif tidak hanya berfokus pada pemenuhan target tahunan semata, tetapi juga berupaya memacu tren laju pertumbuhan penerimaan yang positif dan berkelanjutan melalui efisiensi sistem pemungutan serta pengawasan potensi pasar. Sinergi antara tata kelola keuangan yang akuntabel oleh steward dan optimalisasi potensi pertumbuhan penerimaan daerah akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan di Kota Kediri.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang meneliti dinamika penerimaan pajak daerah. Penelitian Putra (2022) menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi dan intensifikasi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap akselerasi laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan laju pertumbuhan dapat diwujudkan melalui penguatan sistem administrasi dan modernisasi pemungutan. Selain itu, penelitian Fawwaz Praditya et al. (2024) mengungkapkan bahwa fluktuasi efektivitas dan lambatnya pertumbuhan pemungutan pajak parkir sangat dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas serta lemahnya pengawasan target di lapangan. Penelitian Elsa Monika dan Nur Laila Meilani (2023) juga menemukan bahwa pencapaian kinerja pajak daerah masih menghadapi tantangan berupa kontraksi laju pertumbuhan penerimaan pada periode-periode tertentu. Sementara itu, penelitian Siahaan dan Anggiat (2024) menunjukkan pentingnya penjagaan laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah secara stabil demi menopang realisasi PAD. Berbagai hasil penelitian tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir merupakan faktor kuantitatif yang sangat penting dalam memacu akselerasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri.

3. Pengaruh Efektivitas Pajak Parkir dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2018–2025

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 13,258 dengan nilai signifikansi < 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga menunjukkan bahwa Efektivitas Pajak Parkir ($X1$) dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir ($X2$) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. Selain itu, hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai

Adjusted R Square sebesar 0,450, yang berarti kedua variabel independen mampu menjelaskan 45,0% variasi Pendapatan Asli Daerah. Adapun sisanya sebesar 55,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, efektivitas pemungutan pajak daerah lainnya, retribusi daerah, kebijakan fiskal pemerintah daerah, maupun faktor eksternal lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Stewardship Theory, yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sistem pemungutan pajak parkir yang efektif dalam mencapai target tahunan serta upaya memacu laju pertumbuhan penerimaan secara konsisten dari periode ke periode. Apabila BPKAD Kota Kediri sebagai steward mampu melaksanakan fungsi efektivitas pemungutan dengan baik dan berhasil mengakselerasi tren laju pertumbuhan penerimaan potensi pajak parkir, maka akumulasi penerimaan pajak parkir akan meningkat secara optimal sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, sinergi antara efektivitas pemungutan target dan keberlanjutan laju pertumbuhan penerimaan menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi kapasitas fiskal daerah.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Teori Efektivitas Organisasi (Goal Attainment Approach) yang menyatakan bahwa suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam pengelolaan pajak parkir, tujuan pemerintah daerah BPKAD Kota Kediri adalah mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pencapaian tujuan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan pajak dalam memenuhi pencapaian target APBD, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak yang dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, efektivitas pemungutan pajak dan laju pertumbuhan pajak parkir merupakan dua faktor kuantitatif yang saling melengkapi dalam mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Rahmawati et al. (2024) dan Sibarani et al. (2025) sama-sama menegaskan pentingnya efektivitas pengelolaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meskipun diperoleh hasil yang berbeda terkait besarnya proporsi kontribusi pajak parkir. Penelitian Fawwaz Praditya et al. (2024), Putra (2022), Elsa Monika dan Nur Laila Meilani (2023), serta Siahaan dan Anggiat (2024) juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan dan efektivitas pengelolaan pajak merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak parkir. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah memerlukan sinergi antara efektivitas pemungutan pajak parkir dan terjaganya laju pertumbuhan penerimaan yang positif, sehingga pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pemungutan berbasis digital (QRIS/VA), pengawasan target, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam menginterpretasikan hasil temuan. Pertama, terkait keterbatasan data sekunder, peneliti tidak dapat mengontrol secara penuh kualitas pencatatan internal wajib pajak dalam melaporkan omzet usaha parkirnya secara self-assessment sebelum data

tersebut disetorkan dan dicatat oleh BPKAD Kota Kediri. Kedua, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi hasil karena objek pengamatan terbatas pada satu wilayah pemerintah daerah saja, yaitu BPKAD Kota Kediri. Kondisi tersebut menyebabkan temuan dalam penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik penerimaan pajak parkir dan struktur ekonomi daerah yang berbeda. Ketiga, terdapat keterbatasan dari segi kecukupan variabel independen dalam model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,450 menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini baru mampu menjelaskan 45,0% variasi Peningkatan PAD Kota Kediri, sedangkan sisa 55,0% variasi lainnya masih dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian, seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, PBB-P2, BPHTB, maupun Laju Inflasi Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh efektivitas pajak parkir dan laju pertumbuhan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,352 dengan nilai signifikansi 0,021, yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pelaksanaan pemungutan pajak parkir, maka semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah.
2. Laju Pertumbuhan Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,124 dengan nilai signifikansi < 0,001, sehingga hipotesis kedua diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat laju pertumbuhan pajak parkir dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin besar penerimaan pajak parkir yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Efektivitas Pajak Parkir dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 13,258 dengan nilai signifikansi < 0,001. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,450 menunjukkan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan 45,0% variasi Pendapatan Asli Daerah, sedangkan 55,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan.

1. Bagi Pemerintah Daerah/BPKAD, diharapkan terus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak parkir melalui penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, pembaruan basis data objek pajak, serta peningkatan koordinasi dengan pengelola parkir. Selain itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan melalui sosialisasi perpajakan, pembinaan, pelayanan yang lebih baik, dan penegakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga penerimaan pajak parkir dapat terus dioptimalkan.
2. Bagi masyarakat umum, masyarakat diharapkan mendukung efektivitas pemungutan pajak dengan membiasakan meminta bukti pembayaran parkir resmi atau bertransaksi secara nontunai. Kesadaran masyarakat secara tidak langsung membantu pengawasan penerimaan daerah yang alokasinya dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur Kota Kediri.

3. Bagi wajib pajak parkir, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak parkir sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah. Kepatuhan tersebut tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi Pendapatan Asli Daerah, seperti pengawasan pajak, digitalisasi pelayanan pajak, kualitas pelayanan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, ataupun jumlah objek pajak parkir. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, jumlah data yang lebih banyak, atau membandingkan beberapa pemerintah daerah agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public Economics, 1(3-4), 323-338. https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2

Alm, J. (2012). Measuring, explaining, and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies. International Tax and Public Finance, 19(1), 54-77. https://doi.org/10.1007/s10797-011-9171-2

Ananda, D., Hardiyanti, D., Gusliyana, M., & Arum, P. D. S. (2025). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Madiun. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Andriani, N., & Susanto, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 16(1), 45–56.

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2014). Redistribution via taxation: The limited role of the personal income tax in developing countries. Canadian Tax Journal, 62(4), 939-967.

BPKAD Kota Malang. (2026). Public hearing dan forum perangkat daerah di BP2D rekomendasikan solusi atasi masalah perparkiran dan perubahan tarif pajak air tanah

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of management. Academy of Management Review, 22(1), 20-47.

Devano, S., & Rahayu, S. K. (2016). Perpajakan: Konsep, teori dan isu. Jakarta: Kencana.

Devos, K. (2014). Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour. Springer.

Dharma, A. (2025). Penguatan Administrasi Perpajakan Daerah dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal. Jurnal Tata Kelola Keuangan Daerah, 10(1), 12–25.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49-64.

DPRD Kota Bogor. (2026). Komisi II soroti potensi PAD parkir ritel di Bogor. RRI.co.id. Retrieved from https://rri.co.id/info-pemda/2193709/komisi-ii-soroti-potensi-pad-parkir-ritel-di-bogor

Fatmayani, D., & Asalam, A. G. (2025). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2019-2024. eProceedings of Management, 11(5).

Fitri Sari, A., Mustika, A. P., & Puspita Sari, D. P. (2024). Analisis efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. JAKTA: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi.

Fitriani, D. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Pemungutan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. [Tersedia di Google Scholar]

Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2023). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (Edisi ke-10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (7th ed.). Pearson.
Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Hamidah, N. N. (2022). Analisis efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan pajak daerah sebelum dan saat pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya). Repository Universitas Bhayangkara Surabaya.
Hidayat, T. (2020). Transparansi dan akurasi pelaporan pajak dalam sistem pemungutan yang efektif. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 8(2).
Insight Blitar. (2024). APBD dan PAD Blitar dibandingkan 5 daerah sekitar tahun 2023. https://www.insight-blitar.my.id/2024/11/apbd-dan-pad-blitar-dibandingkan-5.html
Kesek, Y. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3), 820–829.
Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. Cambridge University Press.
Koran Memo. (2025). PAD sektor wisata Kota Kediri capai Rp 3,7 miliar pada 2024. https://www.koranmemo.com
Krisniawati. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Ihtiyath, 5(1). https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572
Kuncoro, M. (2018). Metode riset untuk bisnis dan ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Listyaningsih, E., & Hoyriyah, S. (2024). Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 1(3), 164-177.
Lorensa, R., & Fitrayudi. (2023). Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12(4), 101–115.
Lubis, M. R., & Harahap, S. A. (2024). Penerapan tapping-box pada pajak parkir Kota Medan. Repositori Universitas Sumatera Utara. Retrieved from https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/98045
Mahmudi. (2018). Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2019). Perpajakan: Edisi 2019. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2021). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Monika, E., & Meilani, N. L. (2023). Pengaruh pengelolaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 8(2), 1–12.
Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice (5th ed.). McGraw-Hill.
Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
Norman, P., & Conner, M. (2005). The theory of planned behavior and exercise: Evidence for the mediating and moderating roles of planning on intention-behavior relationships. Journal of Sport and Exercise Psychology, 27(4), 488-504. https://doi.org/10.1123/jsep.27.4.488
Nugroho, A. D. (2020). Sinergitas efektivitas pemungutan dan kepatuhan wajib pajak dalam kontribusi terhadap PAD. Prosiding Seminar Nasional Keuangan Daerah.
Nurhayati, N., Mulyani, S., & Hasanah, N. (2020). Optimalisasi Pajak Daerah dalam Memperkuat Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota. Jurnal Keuangan Publik, 7(2), 112–125.
Nurjannah, N., Muliadi, M., & Effendi, E. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(1), 33–44.
Pemerintah Kota Kediri. (2023). Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024. https://peraturan.bpk.go.id

Pemerintah Kota Kediri. (2024). Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pemerintah Kota Pekanbaru. (2026). PAD Pekanbaru meningkat, Pemko optimalkan smart tax dan evaluasi pajak parkir. Retrieved from https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pad-pekanbaru-meningkat-pemko-optimalkan-smart-tax-dan-evaluasi-pajak-parkir
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Praditya, F. F. (2024). Efektivitas pemungutan pajak parkir Kota Samarinda: Pengaruh kepatuhan wajib pajak. Jurnal STIH-Awanglong.
Prakoso, K. B. (2005). Pajak dan retribusi daerah. Yogyakarta: UII Press.
Prasiwi, A., Faradhila, G. L., Dewi, M. Z., & Rahmandhani, A. Z. P. (2024). Analisis kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2024. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak, 2(2), 45–58.
Pratama, A., & Wulandari, D. (2022). Analisis efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. Jurnal Akuntansi dan Pajak Daerah, 7(1), 45–56.
Pratiwi, D., & Sari, R. (2023). Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jurnal Ekonomi Daerah, 11(2), 88–98.
Putra, R. (2022). Perpajakan daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Rahayu, S. K. (2018). Bekerjakah kebijakan tax amnesty sebagai landasan reformasi pajak guna meningkatkan penerimaan pajak? (Studi pada Kanwil DJP Jawa Barat I)
Rahmawati, T., & Firmansyah, A. (2025). Efektivitas retribusi parkir Kota Tasikmalaya. Universitas Galuh. Retrieved from http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/7987
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta.
Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
Robbins, S. P. (1994). Teori organisasi: Struktur, desain dan aplikasi. Jakarta: Arcan.
Saepulloh, M., & Yanti. (2023). Efektivitas pemungutan pajak parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang 2019–2022. ACCOUNT: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan.
Santoso, S. (2019). Menguasai statistik dengan SPSS. Elex Media Komputindo.
Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh norma subjektif dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 11(1), 13-25 .
Sari, D., & Mustika, I. (2021). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Manajemen Keuangan, 9(3), 150–162.
Sari, M., & Fitriani, N. (2024). Efektivitas pemungutan pajak parkir Kota Pekanbaru. Universitas Islam Riau. Retrieved from https://repository.uir.ac.id/27058/
Sari, R., & Hidayat, M. (2021). Efektivitas dan Potensi Pajak Parkir Kota Surabaya. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 15(1), 70–81.
Siahaan, A. R. P. (2023). Evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak parkir dalam melaporkan pajak parkir di Kota Medan. Universitas Sumatera Utara Repository.
Siahaan, M. P. (2013). Pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
Siahaan, M. P., & Anggiat. (2024). Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
Sibarani, T., Susilawaty, L., & Junawan. (2024). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Medan, 12(1), 15–28.
Siregar, S. (2021). Statistika deskriptif untuk penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
Steers, R. M. (2005). Efektivitas organisasi (Terjemahan). Erlangga. Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Torgler, B., & Schneider, F. (2007). What shapes attitudes toward paying taxes? Evidence from multicultural European countries. Social Science Quarterly, 88(2), 443-470.
Tyaswarman. (2022). Pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Jakarta: Prenadamedia Group.
Umam, K., Rochinda, A., & Suharto. (2024). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi Publik, 8(1), 101–112.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Widarjono, A. (2018). Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya. UPP STIM YKPN.
Wulandari, A., Nurmala, & Hendri. (2022). Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 13(2), 90–103.
Wulandari, D. S. (2021). Pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Humaniora (EKSISHUM), 1(1)